

RESTRUKTURISASI PENDIDIKAN MENUJU BANGSA BERKARAKTER

Mustofa Kamal¹

Abstrak

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan karakter menjadi kunci terpenting kebangkitan Bangsa Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong datangnya peradaban baru. Krisis multidimensi yang menjadi persoalan bangsa. Hal ini terjadi karena bangsa ini tidak percaya diri dalam membangun dan mengkonsep untuk kemajuan bangsa.

Menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, akan mengembalikan kedaulatan, menjagi bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Pendidikan yang didesign bukan lagi pendidikan yang meniru Negara lain. Konsep pendidikan dibuat berdasarkan karakter masyarakat dengan mengedepankan norma, nilai, dan budaya yang berkembang.

Kata Kunci : Pendidikan, Karakter, Budaya.

A. Latar Belakang

Salah satu mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia pada masa mendatang telah termuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan.

¹ Mustofa Kamal, M.Ag. adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) pematang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah bisa ditinggalkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana terpenting dalam usaha pembangunan sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana dan tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dan berperadaban.²

Pendidikan bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, direncanakan, didesain, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan proses aktivitas yang disengaja merupakan gejala masyarakat ketika sudah mulai disadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana dicita-citakan masyarakat.

Indonesia pada era sebelum reformasi dikenal dengan sebutan macan Asia. Bangsa ini banyak memberikan kontribusi dan keberadaannya sangat diperhitungkan bangsa lain, sebagai motor penggerak sekaligus penggagas Gerakan Non Blok (GNB), menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, serta berperan aktif menjaga perdamaian dunia. Pada saat yang sama, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak mahasiswa luar negeri yang menjadi mahasiswa di berbagai kampus yang tersebar di Indonesia. Banyak Guru dan Dosen yang diperbantukan di luar negeri untuk menjadi dosen tamu.

Saat ini, Indonesia adalah negara besar yang gemuk, namun tidak bisa memberikan kontribusi apapun bagi warganya. Tidak ada lagi mahasiswa luar yang tertarik dengan kampus-kampus nasional. WNI yang ada diluar negeri, bukan lagi para guru, dosen ataupun tenaga ahli, namun tenaga rendahan, pekerja bangunan, dan para pembantu rumah tangga yang sering mendapatkan perlakuan kasar majikan.

Berdasarkan data dari Litbang Kompas (dalam <http://www.pendidikankarakter.com/pentingnya-pendidikan-karakter-dalam-dunia-pendidikan/>) disebutkan beberapa data yang mencengangkan terkait korupsi sebagai berikut 158 kepala daerah tersangkut korupsi sepanjang 2004-2011, 42 anggota DPR terseret korupsi pada kurun waktu 2008-2011, 30 anggota DPR periode 1999-2004 terlibat kasus suap pemilihan DGS BI, Kasus korupsi

² Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme. Alih bahasa oleh Khalif Muammar, Usep Muhammad Ishaq, dkk. (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pengembangan Insan PIMPIN, 2010), hlm. 23

terjadi diberbagai lembaga seperti KPU, KY, KPPU, Ditjen Pajak, BI, dan BKPM.

Apa yang bisa diharapkan dengan bangsa dan negara ini. Media informasi mulai media cetak sampai elektronik tiap harinya tak pernah kehabisan bahan untuk pemberitaan. Kriminal dan kejahatan tak ubahnya air, terus mengalir tanpa henti. Belum usai satu kasus kriminal, datang lagi kasus lain. Karena seringnya, rasa-rasanya kita muak mendengar pemberitaan semacam itu. Hukum menjadi sangat tajam bagi rakyat biasa, sementara untuk para pejabat menjadi semakin tumpul. Hati nurani menjadi tidak berdaya menemukan kebenaran apabila norma-norma yang biasanya dipakai sebagai landasan pertimbangan menjadi tidak pasti.³

Pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita adalah bagaimana dengan pendidikan nasional kita, sudah berhasilkah mencetak para sarjana yang berilmu pengetahuan, beriman dan bertakwa, atau justru sebaliknya. Pendidikan nasional telah gagal mengantarkan generasi bangsa sesuai yang diharapkan para pejuang dan leluhur bangsa ini.

Langkah yang diambil bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan krisis multidimensi ini adalah rekonstruksi moral secara total dengan membangun kembali karakter dan jati diri bangsa.

B. Pembahasan

1. Krisis Karakter Menjadi Realitas Nyata

Dalam kasus Indonesia, krisis karakter, mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan kemampuan untuk mengerahkan potensi masyarakat guna mencapai cita-cita bersama. Krisis karakter ini seperti penyakit akut yang terus menerus melemahkan jiwa bangsa, sehingga bangsa kita kehilangan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan bermartabat di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Krisis karakter di Indonesia tercermin dalam banyak fenomena sosial ekonomi yang secara umum dampaknya menurunkan kualitas kehidupan masyarakat luas.

Korupsi, mentalitas peminta-minta, konflik horizontal dengan kekerasan, suka mencari kambing hitam, kesenangan merusak diri sendiri, adalah beberapa ciri masyarakat yang mengalami krisis karakter. Korupsi, korupsi adalah salah satu bentuk krisis karakter yang dampaknya sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Korupsi menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi bangsa ini, dan pada gilirannya menjadi sumber dari berkembangnya kemiskinan di Indonesia. Dalam pergaulan internasional, posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia telah menyebabkan bangsa ini kehilangan martabat di tengah-tengah bangsa lain. Korupsi terjadi karena orang-orang kehilangan beberapa karakter baik, terutama sekali kejujuran, pengendalian diri (self regulation), dan tanggung jawab sosial.

³ Purwo Hardiwaroyo, Moral dan Masalahnya, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 9

Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Namun, di pihak lain masyarakat Indonesia nampaknya adalah masyarakat yang sangat rajin melakukan kegiatan keagamaan. Bahkan tidak jarang orang Indonesia membanggakan diri sebagai masyarakat yang hidupnya sangat religius, dan sepanjang yang saya ketahui, tindakan korupsi, atau mengambil yang bukan haknya atau milik orang lain, seperti juga mencuri, dilarang oleh semua agama. Sungguh sebuah 'keganjilan' bahwa masyarakat yang merasa religius namun negaranya penuh korupsi.

Lebih memprihantinkan lagi adalah bahwa menurut salah seorang pejabat KPK, lembaga negara yang paling korup adalah Departemen Agama . Apabila pernyataan tersebut didasarkan pada data yang dapat dipercaya, maka hal ini adalah contoh yang paling nyata dari hipokrisi di Indonesia, di samping sekian banyak contoh yang lain. Hipokrisi atau kemunafikan mengandung arti kepura-puraan atau menyuruh atau menasihati orang lain melakukan hal yang baik namun dia sendiri melakukan hal sebaliknya. Lebih parahnya lagi, hampir semua tahanan memiliki nama yang berbau religious.

Kesenangan mencari kambing hitam. Kebiasaan menimpakan kesalahan kepada orang lain, merupakan salah satu karakter yang menghambat kemajuan. Ini bukan kekuatan, namun kelemahan. Di masa lalu kita masih sering mendengar banyak orang menyatakan bahwa sulitnya Indonesia mencapai kemajuan lama sesudah kemerdekaan adalah akibat ulah penjajah Belanda.

Dalam mencari penyebab rusaknya ekonomi Indonesia sekarang kita punya kambing hitam baru, konspirasi Amerika Serikat, IMF, World Bank, dan akibat dominasi golongan minoritas. Seandainya sinyalemen itu benar, sebenarnya ada cara bertanya yang lain: Apa yang salah dengan bangsa kita yang menyebabkan kita beratus-ratus tahun bisa dijajah oleh Belanda -kerajaan yang sangat kecil dari jumlah penduduk dan luas wilayah; bisa menjadi korban konspirasi Amerika Serikat, IMF dan World Bank, dan kelompok mayoritas belum bisa menguasai sebagian besar kegiatan ekonomi di Indonesia ? Pertanyaan terakhir ini jarang sekali dikemukakan, karena adanya arogansi bahwa 'kami selalu benar'. Akibatnya, bangsa kita kurang bisa belajar dari pengalamannya sendiri, dan kurang mampu berubah ke arah yang lebih baik karena merasa bahwa tak ada yang perlu diperbaiki pada diri kita.

Disengagement atau ketidakpedulian telah menjadi bagian penting dari ekspresi sosial publik sebagai respons atas ketidakpastian yang dialami. Sikap ini juga merupakan pernyataan tentang hilangnya harapan masyarakat akan terjadinya perbaikan dalam hidup mereka. Bentuk-bentuk ekspresi masyarakat tersebut merupakan tanda perlunya perenungan yang seksama tentang orientasi pembangunan nasional selama ini.⁴

⁴ Sujarwadi, Reorientasi Pembangunan Nasional: Menuju Indonesia Yang Berdaulat dan Bermartabat, Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke-58 UGM, Yogyakarta, 19 Desember 2007, hlm. 9

2. Pentingnya Pendidikan Karakter

Kata karakter (Inggris: character) berasal dari bahasa Yunani (Greek), yaitu *charassein* yang berarti “*to engrave*”. Kata “*to engrave*” bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan⁵. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “karakter” diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Manusia berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan makna seperti ini berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir.⁶

Pengertian karakter secara istilah dikemukakan oleh Thomas Lickona. Menurutnya karakter adalah “A reliable inner disposition to respond to situations in a *morally good way*.” Selanjutnya Lickona menambahkan, “Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral *behavior*”.⁷ Menurut Lickona, karakter mulia (good character) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap (attitudes), dan motivasi (motivations), serta perilaku (behaviors) dan keterampilan (skills).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (character education).

Untuk melengkapi pengertian tentang karakter ini akan dikemukakan juga pengertian akhlak, moral, dan etika. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab “*al-akhlaq*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*al-khuluq*” yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat⁸. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan

⁵ Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1987), Cet. XV, hlm. 214

⁶ Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: Grasindo, 2007), Cet. I Hlm. 80.

⁷ Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility, (New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: 1991), hlm. 51.

⁸ Ilamzah Ya'qub, Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar), (Bandung: CV Diponegoro, 1988), Cet. IV, hlm. 11

dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran.⁹

Pendidikan karakter menjadi kunci terpenting kebangkitan Bangsa Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong datangnya peradaban baru. Di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak Pendidikan Karakter dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat Peringatan Hari Pendidikan Nasional, pada tanggal 2 Mei 2010 lalu. Tekad Pemerintah tersebut bertujuan untuk mengembangkan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional yang harus didukung secara serius. Karakter bangsa dapat dibentuk dari program-program pendidikan atau dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Akan tetapi, apabila pendidikan memang bermaksud serius untuk membentuk suatu karakter generasi bangsa, ada banyak hal yang harus dilakukan, dan dibutuhkan kesadaran terhadap para pendidik dan juga terhadap pelaksana kebijakan pendidikan.

Berkaitan dengan proses kebudayaan yang secara umum sedang berjalan, dan juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan kesadaran, membentuk cara pandang, dan juga membangun karakter generasi muda. Artinya, karakter yang menyangkut cara pandang dan kebiasaan siswa, remaja, dan juga kaum muda secara umum sedikit sekali yang dibentuk dalam ruang kelas atau sekolah, akan tetapi lebih banyak dibentuk oleh proses sosial yang juga tak dapat dilepaskan dari proses ideologi dan tatanan material-ekonomi yang sedang berjalan.

Mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui Pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi muda bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan tersebut dapat ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya karakter bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang.

Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai

⁹ Rachmat Djatnika, Sistem Etika Islami, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), hlm. 27

budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga memiliki nilai dan karakter sebagai karakter diri, yang menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga Negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang.

Perkembangan tersebut harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dengan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa adalah perkembangan potensi peserta didik agar menjadi berperilaku baik, dan bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa, untuk memperkuat pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam perkembangan potensi peserta didik yang bermartabat, dan juga untuk menyaring budaya bangsa sendiri dengan bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Atas dasar itulah maka pendidikan karakter menjadi amat penting. Pendidikan karakter menjadi tumpuan harapan bagi terselamatkannya bangsa dan negeri ini dari jurang kehancuran yang lebih dalam. Meski hingga saat ini belum ada rumusan tunggal tentang pendidikan karakter yang efektif, tetapi barangkali tidak ada salahnya jika kita mengikuti nasihat dari Character Education Partnership bahwa untuk dapat mengimplementasikan program pendidikan karakter yang efektif, seyogyanya memenuhi beberapa prinsip berikut ini:¹⁰

1. Komunitas sekolah mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai inti etika dan kinerja sebagai landasan karakter yang baik.
2. Sekolah berusaha mendefinisikan “karakter” secara komprehensif, di dalamnya mencakup berpikir (thinking), merasa (feeling), dan melakukan (doing).
3. Sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, intensif, dan proaktif dalam pengembangan karakter.
4. Sekolah menciptakan sebuah komunitas yang memiliki kepedulian tinggi. (caring)
5. Sekolah menyediakan kesempatan yang luas bagi para siswanya untuk melakukan berbagai tindakan moral (moral action).
6. Sekolah menyediakan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang, dapat menghargai dan menghormati seluruh peserta didik, mengembangkan

¹⁰ <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/07/31/degradasi-moral-dan-prinsip-pendidikan-karakter>

karakter mereka, dan berusaha membantu mereka untuk meraih berbagai kesuksesan.

7. Sekolah mendorong siswa untuk memiliki motivasi diri yang kuat
8. Staf sekolah (kepala sekolah, guru dan TU) adalah sebuah komunitas belajar etis yang senantiasa berbagi tanggung jawab dan mematuhi nilai-nilai inti yang telah disepakati. Mereka menjadi sosok teladan bagi para siswa.
9. Sekolah mendorong kepemimpinan bersama yang memberikan dukungan penuh terhadap gagasan pendidikan karakter dalam jangka panjang.
10. Sekolah melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter
11. Secara teratur, sekolah melakukan asesmen terhadap budaya dan iklim sekolah, keberfungsian para staf sebagai pendidik karakter di sekolah, dan sejauh mana siswa dapat mewujudkan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

3. Identifikasi dan Solusi

Persoalan karakter yang muncul di Negara kita ini bukan sebuah persoalan yang sederhana dan tentu tidak dapat dianggap sebagai suatu kewajiban. Krisis karakter ini bahkan sekarang sudah menjalar ke berbagai sektor dan semua lini kehidupan, mulai dari birokrat, pengusaha, pegawai, pejabat sampai rakyat kecil, semuanya sangat berpotensi melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Apabila ada kesempatan, disitu pasti terjadi praktek KKN.

Melihat hal tersebut sebenarnya ada jalan keluar yang mampu menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Solusi yang paling tepat untuk masalah ini bukan dengan meminta bantuan utang atau tenaga ahli sebanyak-banyaknya dari negara lain. Karena berapa pun bantuan dan utang yang dikucurkan oleh lembaga keuangan dunia serta berapa pun tenaga ahli yang dikirimkan tidak akan mampu menjadi solusi yang baik bahkan sia-sia jika tidak didukung oleh “character and nation building” oleh bangsa Indonesia. Jadi , solusi itu adalah dengan membangun dan menata kembali karakter dan watak bangsa kita sendiri. Namun hal ini dirusak oleh bangsa Indonesia sendiri sejak dulu, sejak jatuhnya masa orde baru yaitu ketika kehidupan politik, budaya dan ideologi bangsa juga mengalami krisis. Hal ini juga makin diperparah dengan terpecah belahnya kesatuan wilayah dan hati bangsa Indonesia. Itu menyebabkan upaya perbaikan nasib rakyat menjadi lebih buruk di dibandingkan sebelumnya.

Membangun karakter bangsa adalah satu-satunya solusi yang tepat dalam menghadapi krisis ini. Hal yang menakjubkan ini hanya pernah di terapkan oleh presiden pertama kita yaitu Bung Karno pada saat itu bangsa Indonesia masih memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dengan karakternya sendiri, yaitu kesatuan seluruh wilayah dan hati bangsa Indonesia serta kepercayaan diri bangsa Indonesia yang tinggi sehingga mampu menjadi bangsa yang patut dibanggakan. Namun, fondasi karakter itu telah rusak karena tidak di teruskan semangatnya oleh penerus selanjutnya sehingga fondasi karakter bangsa ini rusak. Sehingga

yang ada pada saat ini utang semakin membumbung korupsi merajalela, pejabat bias di beli, rasa persatuan berkurang, dan konflik antar bangsa Indonesia sudah makin luntur. Namun, semua hal itu bias ditanggulangi kembali dengan memupuk dan membangun rasa persatuan di berbagai bidang. Rasa persatuan ini memicu bangsa Indonesia untuk terus bekerja sama dalam menghadapi krisis multidimensial ini. Dan persatuan itulah yang menjadi karakter kita.

Konsep pendidikan yang dibuat tidak lagi mengacu pada konsep barat namun mengedepankan karakter dan budaya bangsa Indonesia, yang bermartabat dan berbudi luhur. Jadilah bangsa yang percaya diri, bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, termasuk mendesain konsep pendidikan nasional.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari usaha bangsa kita untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru dengan berdasarkan kebudayaan nasional. Berbagai krisis yang terjadi menunjukkan bahwa masih sangat banyak kepingangan dalam perubahan yang terjadi. Pendidikan Indonesia dewasa ini telah terlempar dari kebudayaan, dan telah menjadi alat dari suatu orde ekonomi, atau alat sekelompok penguasa untuk mewujudkan cita-citanya yang tidak selalu sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Krisis multidimensi yang menjadi persoalan bangsa. Hal ini terjadi karena bangsa ini tidak percaya diri dalam membangun dan mengkonsep untuk kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, akan mengembalikan kedaulatan, menjagi bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Pendidikan yang didesign bukan lagi pendidikan yang meniru Negara lain. Konsep pendidikan dibuat berdasarkan karakter masyarakat dengan mengedepankan norma, nilai, dan budaya yang berkembang.

2. Saran

Peran pendidikan seharusnya dipahami bukan saja dalam konteks mikro, namun juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara dan masyarakat dunia. Hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik, dan negara. Oleh karena pendidikan terjadi di masyarakat, dengan sumber daya masyarakat, dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara silmultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Attas, Syed Muhammad Naquib, Islam dan Sekularisme. Alih bahasa oleh Khalif Muammar, Usep Muhammad Ishaq, dkk. Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pengembangan Insan PIMPIN, 2010
- Djatnika, Rachmat, Sistem Etika Islami, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1987
- Fachtul Muin, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan praktik. Yogyakarta : Arr-ruzz Media, 2011
- Hardiwaroyo, Purwo, Moral dan Masalahnya, Yogyakarta : Kanisius, 1990
- Koesoema A, Doni, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, Jakarta: Grasindo, 2007
- Lickona, Thomas, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility, New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: 1991
- Rachman, Maman, Reposisi, Reevaluasi, dan Redefinisi Pendidikan Nilai Bagi Generasi Muda Bangsa. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun Ke-7, 2000.
- Suhartono, Suparlan, Filsafat Pendidikan, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2009
- Sujarwadi, Reorientasi Pembangunan Nasional: Menuju Indonesia Yang Berdaulat dan Bermartabat, Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke-58 UGM, Yogyakarta, 19 Desember 2007
- Toer, Pramoedya Ananta, Anak Semua Bangsa. Jakarta : Lentera Dipantar, 2006.
- Ya’qub, Hamzah, Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar), Bandung: CV Diponegoro, 1988
- Zuriah, Nurul, Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/07/31/degradasi-moral-dan-prinsip-pendidikan-karakter>
- Depdiknas, Undang-undang No. 20 t 2003, Sistem Pendidikan Nasional, www.depdiknas.go.id